Panduan Mendirikan PT PMA di Indonesia Tahun 2026:
Syarat, OSS, dan Perizinan

Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi investor asing. Dengan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA), proses pendirian perusahaan kini lebih terintegrasi dan transparan. Namun, investor tetap perlu memahami berbagai persyaratan hukum agar kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut panduan singkat mengenai syarat, proses pendirian, dan perizinan PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) di Indonesia pada tahun 2026.

Apa Itu PT PMA?
PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) adalah badan hukum Indonesia yang didirikan dengan sebagian atau seluruh modal dimiliki oleh investor asing, baik perorangan maupun badan hukum. PT PMA merupakan bentuk perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan kepemilikan modal asing di Indonesia.

Syarat Mendirikan PT PMA
Sebelum memulai proses pendirian perusahaan, investor perlu memperhatikan beberapa persyaratan berikut:

- Menentukan bidang usaha sesuai **KBLI** dan memastikan bidang usaha tersebut terbuka untuk investasi asing.
- Memiliki minimal dua pemegang saham.
- Menunjuk paling sedikit satu Direktur dan satu Komisaris.
- Memenuhi ketentuan modal investasi sesuai peraturan yang berlaku.
- Memiliki alamat perusahaan yang sah.

Persiapan yang tepat sejak awal akan membantu mempercepat proses perizinan dan menghindari kendala administratif.

Proses Pendirian PT PMA
Secara umum, proses pendirian PT PMA meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan Struktur Perusahaan: Investor menentukan bidang usaha, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus, dan nama perusahaan.
2. Pembuatan Akta Pendirian: Akta pendirian dibuat oleh notaris dan kemudian diajukan kepada Kementerian Hukum untuk memperoleh status badan hukum.
3. Pendaftaran Melalui OSS-RBA: Setelah perusahaan memperoleh pengesahan, perusahaan didaftarkan melalui sistem OSS untuk mendapatkan:

- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Sertifikat Standar (apabila dipersyaratkan); dan
- Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.

4. Perizinan Sektoral
Beberapa bidang usaha memerlukan izin tambahan dari kementerian atau lembaga terkait, tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

Kewajiban Setelah PT PMA Berdiri
Memperoleh NIB bukan berarti seluruh proses telah selesai. PT PMA juga wajib memenuhi berbagai kewajiban hukum, antara lain:

- melaksanakan kewajiban perpajakan;
- memperbarui data perusahaan apabila terdapat perubahan;
- memenuhi kewajiban pelaporan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut penting untuk menghindari sanksi administratif maupun kendala operasional di kemudian hari.

Mengapa Pendampingan Hukum Penting?

Setiap bidang usaha memiliki karakteristik dan persyaratan perizinan yang berbeda. Kesalahan dalam menentukan KBLI, struktur kepemilikan saham, atau jenis perizinan dapat menyebabkan proses pendirian perusahaan menjadi lebih lama. Pendampingan oleh firma hukum yang berpengalaman dapat membantu investor dalam menyusun struktur perusahaan, mengurus perizinan melalui OSS, serta memastikan seluruh proses pendirian PT PMA telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Mendirikan PT PMA di Indonesia pada tahun 2026 memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari pemilihan bidang usaha hingga pemenuhan kewajiban setelah perusahaan beroperasi. Dengan memahami prosedur yang berlaku dan memperoleh pendampingan hukum yang tepat, investor dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih aman, efisien, dan sesuai dengan regulasi di Indonesia.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum mengenai Perusahaan Permodalan Asing atau PT PMA maka tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

08567572501
info@justianlawfirm.com
www.justianlawfirm.com